| PENDAPATAN ASLI DAERAH |

Jabar Incar Kenaikan Wajib Pajak Kendaraan

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan jumlah wajib pajak setelah mempermudah syarat pembayaran pajak kendaraan tahunan di Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan Pemprov menargetkan jumlah wajib pajak bertambah 5%—7%.

Dia menyebutkan jumlah kendaraan di Jabar sekitar 17 juta unit. Dari jumlah itu, sekitar 14 juta adalah sepeda motor, sedangkan 3 juta adalah mobil. Penerimaan pajak terbesar berasal dari mobil, yakni 70% dari total penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Warga Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi kini hanya perlu membawa STNK dan KTP tanpa perlu membawa BPKB atau fotokopinya.

"Jadi, ini memudahkan masyarakat dalam membayarnya," katanya, Rabu (11/3).

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa menjelang Lebaran, pendapatan rata-rata dari pajak kendaraan menunjukkan peningkatan dari sebelumnya Rp20 miliar per hari.

"Sekarang, dua hari terakhir, mengalami kenaikan menjadi Rp26 miliar," tuturnya.

Dedi memastikan pajak kendaraan yang dibayar ini akan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Jabar.

Sementara itu, di Surabaya, Pemkot menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) Rp73 miliar tahun ini. Berbagai usaha dan inovasi coba diterapkan oleh Pemkot Surabaya, seperti memasifkan penerapan pembayaran parkir nontunai atau digital.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pradana Affan mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan dari sektor retribusi TJU tahun lalu memang belum sesuai dengan target, dengan hanya memperoleh Rp25,2 miliar dari target Rp73 miliar.

Pembayaran parkir secara nontunai adalah salah satu usaha dalam mengamankan PAD Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir. Transaksi yang tercatat secara digital dipastikan uang parkir yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah yang nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas Kota Surabaya ke depannya.

"Memang belum tercapai sesuai target. Namun, kami terus berusaha agar mencapai target dengan salah satunya melalui pembayaran parkir nontunai," ujar Pradana.

Dishub Kota Surabaya pun menargetkan pembayaran transaksi di sebanyak 1.510 titik parkir TJU akan terdigitalisasi sepenuhnya pada tahun 2026. Tak hanya itu, Dishub akan melakukan pemeriksaan terhadap tiap-tiap juru parkir yang belum memperpanjang masa aktif kartu tanda anggota (KTA).

Kepala UPT Parkir TJU Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menegaskan percepatan digitalisasi parkir tersebut dilakukan oleh pemerintah kota mengacu kepada aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil jajak pendapat, sebagian besar responden mendukung penuh penerapan parkir digital di tepi jalan umum.

"Hasilnya, 85% sampai 90% menginginkan parkir tepi jalan umum untuk diberlakukan digitalisasi," katanya. *(Julianus Palermo/k57)*

| BIAYA PEMELIHARAAN KONTAINER |

DPRD SULSEL IMBAU TARIF TAK NAIK

Bisnis, MAKASSAR — DPRD Sulawesi Selatan meminta perusahaan pelayaran yang beroperasi di provinsi itu membatalkan kenaikan tarif *cleaning and maintenance* kontainer karena dilakukan sepihak dan memberatkan pengguna jasa.

Nugroho Nafika Kassa
redaksi@bisnis.com

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid dalam rapat dengar pendapat dengan pelaku usaha di sektor logistik, Selasa (10/3). Menurutnya, pembatalan itu penting untuk menekan disparitas biaya logistik yang berpotensi membebani pelaku usaha di wilayah itu.

Kadir mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi maupun dasar tarif yang ditetapkan pemerintah terkait jasa pembersihan dan pemeliharaan peti kemas. Oleh sebab itu, perusahaan pelayaran diminta untuk tetap memberlakukan tarif lama.

"Gunakan harga yang lama karena ini sudah berlaku sekian lama. Terkait tarif ini, nantinya akan kami konsultasikan apakah perlu dibuatkan peraturan baru atau kebijakan lainnya," ujar Kadir.

Kenaikan tarif, lanjutnya, tanpa payung hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Dia mengingatkan akan ada konsekuensi serius bagi perusahaan yang tetap memaksakan tarif baru.

Menurutnya, Gubernur memiliki kewenangan untuk memutus sementara izin operasional perusahaan yang melanggar. "Jika tarif tetap dinaikkan, kami akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk menghentikan operasional perusahaan tersebut di wilayah Sulsel."

Sebagai tindak lanjut, Komisi D menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi. Selain itu, peninjauan lapangan ke sejumlah depo kontainer akan dilakukan setelah libur Lebaran guna memastikan kepatuhan di lapangan.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Makassar Jon Kenedi menyatakan akan segera melaporkan hasil RDP ini ke kantor pusat di Jakarta. KSOP Makassar siap merumuskan regulasi khusus jika memang diperlukan payung hukum yang lebih spesifik untuk mengatur komponen biaya *cleaning* and *maintenance*.

"Jika memang diperlukan regulasi khusus untuk biaya tersebut, kami akan segera merumuskannya agar ada kepastian hukum bagi semua pihak," tutur Jon.

Rasio Biaya Logistik Indonesia Naik Jadi 14,29% pada 2022

TUNTUT PENGEMBALIAN

Merespons sikap DPRD, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Yodi Nalendra mengapresiasinya. Dia mengimbau para anggota asosiasi untuk mengikuti arahan DPRD dengan tidak membayar selisih kenaikan tarif tersebut. Bagi perusahaan yang telanjur membayar dengan tarif baru, ALFI akan menuntut pengembalian dana.

"Sesuai arahan Dewan, kami diminta tidak membayar kenaikan tersebut. Apabila keputusan ini sudah disetujui hingga ke tingkat pusat, maka semua biaya tambahan yang sudah terlanjur dibayarkan sejak 12 Februari lalu harus dikembalikan atau di-*refund*," kata Yodi.

Sebelumnya, ALFI Sulselbar mengeluhkan kenaikan tarif *cleaning* dan *maintenance* kontainer oleh sejumlah perusahaan pelayaran yang mencapai angka signifikan hingga 300%. Perusahaan pelayaran yang menaikkan tarif biaya *cleaning dan maintenance/inspection* kontainer, termasuk Meratus Line, Tanto, SPIL, PPN Panurjwan Makassar, dan CTP Line.

Yodi mengatakan kenaikan itu memberatkan pelaku usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) dan berisiko memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang di tingkat konsumen akhir.

Sebagai ilustrasi, tarif pemeliharaan kontainer ukuran 20 kaki (20 TEUs) yang semula Rp50.000 naik menjadi rata-rata Rp180.000, sedangkan untuk biaya pemeliharaan kontainer 40 kaki melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp350.000.

> **Gunakan harga yang lama karena ini sudah berlaku sekian lama.**

Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Makassar Zulkifli Zahril juga sempat memberi komentar bahwa asosiasi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan pelayaran terhadap mitra bisnisnya.

"Penyesuaian tarif tersebut sepenuhnya merupakan ranah hubungan *business-to-business* (B2B) antara perusahaan pelayaran dengan relasinya," ucapnya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto pun menyampaikan bahwa tarif tersebut—baik itu berupa biaya pembersihan, perbaikan, ataupun pengawasan—tidak diatur oleh pemerintah dan kesepakatan antara pengguna dan pemberi jasa kontainer.

"Sepanjang yang kami ketahui, bila ada kenaikkan biaya mengenai perawatan kontainer, sepenuhnya *business to business* antara pengguna dan pemberi jasa. Mengapa terjadi kenaikan? Tentu ada alasannya seperti inflasi atau kenaikan upah, dan lainnya," katanya.

Kenaikan tarif pemeliharaan kontainer terjadi di tengah penurunan kinerja ekspor Sulsel.

Ekspor Sulsel pada 2025 terkontrakasi 22,34% jika dengan realisasi hanya US$1,58 miliar. Hal ini terjadi karena penjualan sebagian besar kelompok komoditas unggulan lesu.

Plt. Kabag Umum BPS Provinsi Sulsel Khaerul Agus menyebutkan tujuh komoditas mengalami kontraksi ekspor, termasuk kelompok besi dan baja serta kelompok biji-bijian berminyak. Nilai ekspor besi dan baja, sebagai kontributor terbesar kedua ekspor, tercatat US$248,99 juta, anjlok 42,83% dari tahun sebelumnya. Ekspor biji-bijian berminyak terealisasi US$128,46 juta, turun 15,59% dari realisasi 2024.

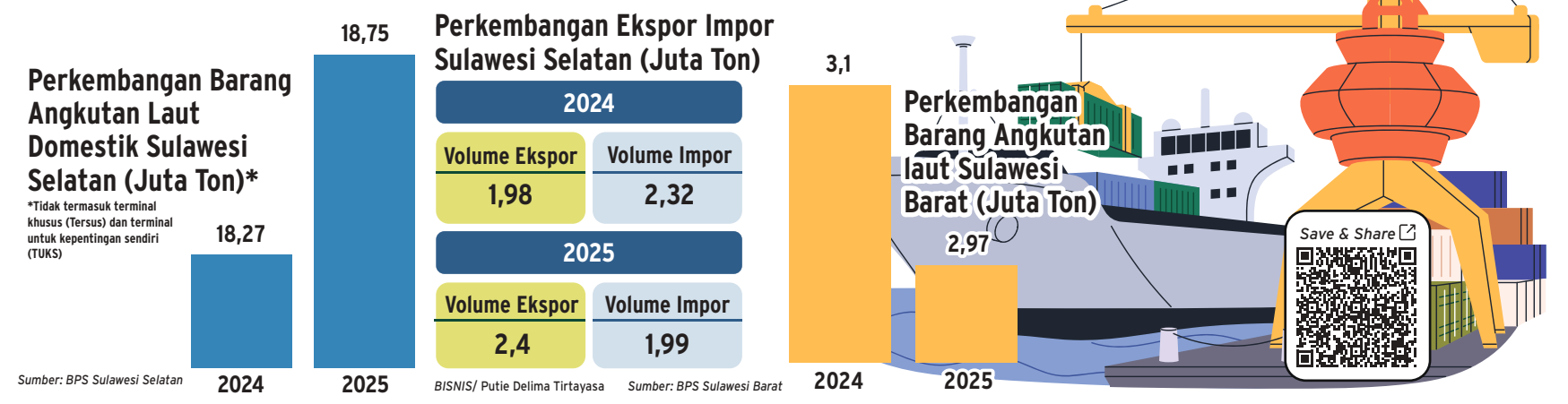
"Komoditas lainnya pun mengalami penurunan kinerja yang cukup dalam, rata-rata di atas 50%, meskipun nilai ekspornya masih jauh dibandingkan nikel, besi, dan biji-bijian berminyak," ujar Khaerul.

Ekspor Sulsel selama tahun lalu paling banyak mengarah ke Jepang, yaitu US$925,12 juta, disusul China US$550,45 juta, dan Taiwan US$36,84 juta.

Kontraksi ekspor Sulsel berlanjut pada Januari 2026 dengan ekspor hanya US$67,74 juta atau 45,43% lebih rendah dari setahun sebelumnya.

Berbanding terbalik, nikel naik tipis 1,63% dengan realisasi ekspor US$888,58 juta. Kinerja selama setahun itu merupakan kabar baik setelah sampai dengan kuartal III/2025, ekspor nikel dalam tren menurun. *(Annasa R. Kamalina)*

- **Dewan akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk menghentikan operasional perusahaan pelayaran di wilayah Sulsel jika tetap menaikkan tarif.**
- **DPRD Sulawesi Selatan menilai kenaikan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pelayaran alias tanpa kesepakatan dengan pengguna jasa dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.**



■ KEPADATAN PELABUHAN KETAPANG



Antara/Budi Candra Setya

Foto udara sejumlah truk antre memasuki kapal untuk menyeberang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (11/3). Kepadatan truk terjadi menjelang pemberlakuan pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri.

| TARGET SWASEMBADA PANGAN |

ID FOOD Bangun Peternakan Ayam di Sumbawa

Bisnis, DENPASAR — *Holding* BUMN Pangan ID FOOD berinvestasi Rp1,2 triliun untuk pembangunan industri ayam terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai *holding* BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan. Saat ini, ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas *cold storage*, 1.051 *dry storage*, serta lebih dari 900 armada logistik di berbagai wilayah Indonesia.

"Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi," kata Ghimoyo dalam siaran pers, baru-baru ini.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin. Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema *contract farming* dan perjanjian *offtake*, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga kredit usaha rakyat.

Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

NTB ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional. *(Harian N. Saputra)*